

Implementation Government Accounting Standards and Accounting Information System To Quality of Financial Statement

Rukmi Juwita
Politeknik Pos Indonesia
Jl. Sarijadi no 54 Bandung
rukmi_juwita@poltekpos.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi system informasi akuntansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah kota/kabupaten di provinsi jawa barat (2) pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi system informasi akuntansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah kota/kabupaten di provinsi jawa barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi system informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian regresi secara simultan dengan uji F maupun parsial dengan uji t, memperlihatkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi system informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci :Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem informasi akuntansi, Kualitas laporan keuangan.

Abstrack

The purpose of this study to determine and analyze (1) influence the implementation of government accounting standards and implementation of accounting information system partially on the quality of financial reporting in areas of the city / county in the province of West Java (2) influence the implementation of government accounting standards and implementation of accounting information systems simultaneously on the quality of financial reporting in the area of the city / county in the province of west Java.

The results showed that the Pearson correlation test results to variable implementation of government accounting standards and implementation of accounting information systems have a very strong relationship / linked to the quality of financial statements. Results of regression testing simultaneously with the partial F test and t-test, showed that the implementation of government accounting standards and implementation of accounting information system significantly affect the quality of financial statements.

Keyword : government accounting standard, accounting information system, quality of financial reporting.

1. PENDAHULUAN

Penelitian tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap laporan keuangan ini dilatar belakangi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara,

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga - lembaga publik baik di pusat maupun di daerah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik [13]. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*. *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Pemerintah Daerah di haruskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD), Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan [18]. Penelitian tentang pentingnya laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengemukakan pentingnya laporan tahunan sebagai alat memperkuat akuntabilitas [1][2][8], ada juga beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia bagi publik dan sebagai alat pengungkap utama [6], laporan tahunan memiliki peranan penting sebagai media komunikasi masa meskipun laporan tahunan bukanlah satu-satunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih dipandang sebagai sumber penting karena luas cakupan dan ketersediaannya [7], informasi yang dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan tahunan adalah fokus dari riset yang merupakan seperangkat alat dalam kerangka kerja akuntabilitas publik [3][4].

Standar Akuntansi Pemerintahan diberlakukan agar laporan keuangan baik pemerintahan pusat maupun daerah, serta satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah distandarisasi [19]. Pentingnya penerapan SAP sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah adalah untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel serta kesamaan criteria-kriterai yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi pemerintah yang distandardisasi diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas. Selain membantu fungsi transparansi dan akuntabilitas, juga dapat memberikan landasan konseptual tentang prosedur, tehnik dan metode yang layak yang dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (general Purpose financial statement). Penerapan SAP memiliki dimensi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan (disclosure) [20]. Selanjutnya penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah merupakan penentu atas Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan [17]. Perubahan dalam standar akuntansi pemerintahan sebagai dasar pelaporan keuangan akan terakses pada penurunan kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan

kemampuannya untuk dipahami oleh para pengguna, khususnya bagi entitas laporan yang belum sepenuhnya dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baru[5]. Pada penelitian yang berjudul Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyimpulkan bahwa Laporan keuangan inspektorat jendral departemen pendidikan nasional tahun 2007 dan 2008 yang disusun setelah penerapan SAP telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik [15]. Kemudian penelitian yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Blitar) menyimpulkan Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan Bahwa Faktor Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*, Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi[14].

Sistem informasi akuntansi diperlukan oleh organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi Sektor Publik seperti di pemerintahan daerah untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, Sistem informasi akuntansi yang terdapat di Pemerintah Daerah disebut dengan Sistem informasi keuangan daerah SIKD dan Implementasi yang terbaru adalah SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Sistem informasi akuntansi atau Sistem informasi keuangan daerah yang memadai diharapkan akan meningkatkan kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Informasi dari laporan keuangan akan berkualitas jika : Dapat dipahami, Relevan, Andal dan Dapat dibandingkan [9][20]26].

Penelitian mengenai Sistem informasi manajemen keuangan daerah dan kualitas informasi terhadap keputusan optimal, telah memberikan keyakinan bahwa Sistem informasi memiliki kontribusi yang kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan[16], terkait dengan masalah informasi, keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran sangat tergantung dari Standar akuntansi yang di dukung data dan proses yang memadai[10].

Di Jawa Barat sendiri implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan implementasi Sistem Informasi Akuntansi di harapkan mampu menghasilkan Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi menjadi lebih berkualitas dibandingkan dengan sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah menyangkut transformasi akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini tersebut dapat diketahui dari fenomena masalah yang teramati, yaitu:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disiapkan sering mengalami keterlambatan yang berekses kepada tidak tepatnya waktu pelaporan keuangan daerah ke BPK RI. BPK RI menemukan 10 kasus Kelemahan SPI karena Entitas terlambat menyampaikan laporan. Kasus di Jawa Barat tahun 2010, laporan pertanggungjawaban keuangan pemprov jabar dan 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat seharusnya sudah diterima oleh DPRD provinsi jabar paling lambat tanggal 30 Juni, tetapi sampai bulan juli laporan keuangan tersebut belum selesai di audit. Hal ini berimbas pada waktu pembahasan APBD tahun 2010 yang mengalami keterlambatan, akhirnya pemerintah jawa barat memutuskan untuk melanjutkan proses penganggaran dengan meminta Gubernur menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD[24].
2. Rapat konsolidasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 3 september 2010 oleh pimpinan pemerintahan jawa barat ditambah perwakilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Jawa Barat menegaskan Rencana Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) di semua SOPD yang bertujuan agar pembuatan laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat[25]
3. Perlakuan Akuntansi terhadap aset tetap adalah masalah yang paling sering di temukan dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan terutama dalam hal pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi

atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Banyak aset pemerintah pusat/daerah diperoleh pada periode-periode yang telah lampau, sedangkan catatan atas harga perolehan maupun harga wajar saat perolehan tidak diketahui. Atas aset-aset tersebut tidak mungkin dinilai dengan menggunakan harga perolehan atau nilai wajar saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun [26]. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset sejenis di pasaran. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, data yang ada pada Buku Inventaris pada masa itu adalah Harga Perolehan. Maka Neraca Awal pemerintah pusat tahun 2004 saat itu masih menggunakan Harga Perolehan.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam PSAP 07 tentang aset tetap disebutkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset [20]. Penyusutan merupakan alat untuk mendapatkan penyajian yang wajar di Neraca dari tahun ke tahun. Dalam akuntansi pemerintah penyusutan lebih ditujukan untuk alokasi biaya. Meskipun sudah di atur oleh Undang-undang namun hingga hari ini, di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih belum jelas pelaksanaannya.
5. Masalah penyajian piutang pajak dan retribusi per 31 desember 2009 di Pemda Jabar sebesar Rp. 14,28 milyar, diantaranya merupakan piutang pajak pada Dinas Pendapatan sebesar Rp. 11,65 miliar. Nilai piutang tersebut tidak didukung dengan rincian dan dokumen sumber yang memadai. Lebih lanjut saldo tersebut berbeda sebesar Rp. 532,75 juta dibandingkan saldo menurut Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan dalam pengendalian atas pengakuan pencatatan piutang pajak, yang berasal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP).
6. Penyajian persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 295,17 miliar di antaranya merupakan persediaan buku pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7,97 miliar belum disajikan berdasarkan *stock opname*, dan nilai persediaan alat kesehatan dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 42,38 miliar belum berdasarkan *stock opname* secara menyeluruh [23]
7. Mulai dikembangkannya basis akrual di dalam standar akuntansi pemerintah dengan terbitnya PP No 71 tahun 2010, sehingga basis cash menuju akrual merupakan langkah yang harus dipahami betul manakala akan menerapkan basis akrual sepenuhnya. [21].

2. Metode Penelitian.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menguraikan secara tuntas dan jelas mengenai karakteristik permasalahan atau fenomena yang di hadapi. Sedangkan penelitian yang bersifat verifikatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis. Untuk itu metode yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variable yang diteliti [11], alasan peneliti memilih metode penelitian survey eksplanatori karena peneliti ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu, yaitu fenomena yang berkaitan dengan masalah masalah dan praktek-praktek dalam penelitian ini [12]

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari; (1) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1), (2) Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (X_2), Dan (3) Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan (X_1), dan implementasi Sistem Informasi Keuangan (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) digunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Alasan penggunaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini karena variabel independen berjumlah lebih dari satu yaitu ada dua variabel.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka model persamaan regresi berganda untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

β_0 = Koefisien *intercept* (konstanta), yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol

β_1 = Koefisien regresi variabel X_1

β_2 = Koefisien regresi variabel X_2

X_1 = implementasi standar akuntansi pemerintahan

X_2 = implementasi Sistem Informasi Keuangan

ε = *Error term* dari variabel-variabel lain

hipotesis penelitian dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

1) Hipotesis Pertama:

$$H_{01} : \beta_i = 0, (i = 1,2)$$

Implementasi standar akuntansi pemerintahan (X_1) dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan (X_2) secara **bersama-sama/simultan** tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

2) Hipotesis Kedua :

$$H_{02} : \beta_i \leq 0, (i = 1,2)$$

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan (X_2), secara **parsial** tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

3. Pembahasan dan analisis

3.1 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hipotesis yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0.05$), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya kontribusi atau pengaruh standar akuntansi pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan adalah 36,5%, artinya 36,5% peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan. Dari distribusi penilaian responden terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan dapat dilihat bahwa penilaian responden tertinggi terdapat pada dimensi pengakuan dan dimensi pengungkapan, pengakuan diwujudkan dalam

penggunaan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sementara pengungkapan diwujudkan dalam penyajian secara lengkap atas seluruh informasi yang dibutuhkan para pengguna. sementara untuk penilaian responden terhadap kualitas laporan keuangan tertinggi terdapat pada dimensi relevan, relevan artinya informasi harus memiliki kaitan dengan keputusan yang akan di ambil. Dari hasil penilaian responden dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan relevan karena penggunaan basis akuntansi yang sangat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi, sehingga informasi yang dihasilkan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.2. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hipotesis yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0.05$), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan sistem informasi akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem informasi akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya kontribusi atau pengaruh sistem informasi akuntansi pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan adalah 21,9%, artinya 21,9% peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh sistem informasi akuntansi pemerintahan. Hasil penilaian responden terhadap implementasi sistem informasi akuntansi tertinggi pada dimensi software dan terdokumentasinya prosedur, dapat di jelaskan bahwa software yang baik memiliki pengendalian yang baik, software yang baik menunjukkan pengolahan data yang baik pula sehingga kemungkinan kesalahan pengolahan data sangat minim, dengan demikian software yang baik akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang baik pula, demikian juga dengan terdokumentasinya prosedur yang baik akan merekam seluruh transaksi dan prosedur dengan tepat, sehingga laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang sangat lengkap dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengambil keputusan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Sistem informasi Akuntansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan [13][17].

3.3. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Secara Simultan Terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hipotesis yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji-F pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0.05$) diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan adalah 58,4%, artinya 58,4% peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan.

Hal ini dapat di simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dinilai cukup bagus dikarenakan implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi yang digunakan juga cukup bagus. Implementasi standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh pemda di Jawa Barat menunjukkan bahwa dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan standar akuntansi pemerintahan sebagian besar telah di dilakukan dengan baik dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat merepresentasikan kondisi keuangan pemerintahan dengan cukup baik. Dan implementasi sistem informasi akuntansi yang dilakukan di kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan sebagian besar telah menunjukkan kualitas yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sangat membantu dan sangat memadai sehingga dapat mendukung dengan cukup baik laporan keuangan yang disajikan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa standar akuntansi pemerintahan yang baik dan sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*, sesuai dengan PP no 24 tahun 2005.

Besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan adalah 58,4%, sementara sisanya sebesar 42,6% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Faktor-faktor lain tersebut merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 36,5%.
2. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 21,9%.
3. implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 58,4% sedangkan pengaruh faktor faktor lain yang tidak di amati dalam penelitian ini adalah 41,6%.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Boyne, G and J Law 1991: *Accountability and local authority Annual Reports: The case of Weels district councils, financial accountability & Management*, Vol.7, No. PP.179-194.
- [2] Chang and Mos 1985, *An empirical study on the impact of culture on audit detected accounting errors auditing: A journal of Practise and Theory*, Vol 22, Sept 2003.
- [3] Coy et al, 2002; "*Public Accounting: A new Paradigm for collage and university annual Report*; Critical perspectives on accounting, Vol.12, PP, 1-31.
- [4] Hooks et al 2002; *The information gap In annual report accounting, auditing and accountability journal*, Vol 15 no.4, PP.93-109.
- [5] Jeffrey Lesser 1992; *Multi agent Planning as a social process; voting, privacy, and manipulation*. In victor R lesser, editor, proceedings of the first intermediate conferences on multi-agent systems (ICMAS-95) page 431, san Francisco, SA, 1995

- [6] Marston and Shriver 1991; *The use of disclosure indices in accounting Research: A Review article*; British Accounting Review, Vol 23, PP.195-210.
- [7] Parker L and J Guthrie: *New accountability Regimes in Motion*, *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, Vol 21, No.1, PP. 59-81.
- [8] Winfield,R. 1978, *Share Holder Opinion Of Published Financial Statement*, in *Courtis.j (ed), Corporate annual Report Analysis*, afm exploring series no.5, university of New England,PP.176-14

Buku

- [9] Indra Bastian 2006 *Akuntansi Sektor Publik*; Suatu Pengantar, Jakarta Erlangga
- [10] Nurlan darise, *pengelolaan keuangan pada SKPD dan BLU*, jakarta, indeks,2008
- [11] Uma Sekaran 2010 *Research Methods for Business*, New York; John Willey & Sons,inc.

Textbook

- [12] Cooper, Dr & Schindler. P.s 2003 *Business Research Methods 8 th edition*, New York: Mc Graw Hill companies. Inc.
- [13] Marshall B, Romney, Paul John Steinbart 2006; *Accounting Information System*, ninth edition, prentice Hall.

Thesis/disertasi

- [14] Farida aryani 2008; *Peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tesis.
- [15] JamasonSinaga 2007; *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Blitar)*.Tesis.
- [16] Roesyanto Indah A., 2007. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan*, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [17] Sri Mulyani, NS. 2007; *Pengaruh sistem informasi manajem keuangan daerah dan kualitas informasi manajemen terhadap keputusan optimal pimpinan*. Disesrtasi-Unpad.

Standar/ Undang-Undang.

- [18] Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- [19] -----, 2003; *Undang-Undang RI No 17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara*.
- [20] -----, 2005; *Undang-Undang RI No 24 tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*.
- [21] -----, 2010; *Undang-Undang RI No 71 tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*.
- [22] -----, 2004; *Undang-Undang RI. No 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- [23] Slamet Kurniawan (2010)<<http://www.P.go.id>>
- [24] Irfan Suryanagara (2010), Laporan IHPS II BPKP. Melalui(<http://www.Tempo.co>) [13/03/2011]
- [25] Iwa Kartiwa (2010), Melalui <http://www.bakesbangpolinmasda.jabar.prov.go.id> [25/09/2011]
- [26] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Pemerintah RI, 2005.

